

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA NEGERI 3 BANTAENG

Abstrak; penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Pengelolaan bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 3 Bantaeng yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan bantuan operasional sekolah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan yang menjadi informan adalah kepala sekolah, bendahara dana BOS, guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Perencanaan Program BOS di SMA Negeri 3 Banataeng meliputi; melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, menghitung rasional anggaran setiap program kerja, mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis. 2) Pemanfaatan Program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng mencakup; pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, pembelian alat multimedia pembelajaran. 3) Pengawasan Program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng meliputi; Siapa yang mengawasi dana BOS, Waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS, Pengawasan dari Dinas pendidikan Cabang atau Provinsi, Pengawasan dari masyarakat, Hasil pengawasan terkait pemanfaatan dana BOS, Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS. 4) Faktor pendukung pengelolaan program BOS antara lain; Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, terjalannya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan), motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sedangkan faktor penghambat meliputi; waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

PENDAHULUAN

Pendiri bangsa Indonesia telah mengamanahkan bahwa tujuan negara Indonesia di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Banyak pihak yang berperan dalam menyukseskan tujuan ini, sebagaimana dipertegas dalam amandemen UUD 1945, bahwa peran bagi setiap warga negara wajib adalah mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Jenjang pendidikan dasar ini merupakan program pendidikan bagi warga negara berusia tujuh sampai 15 tahun melalui program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 Tahun), meliputi jenjang pendidikan SD/ sederajat hingga SMP/ sederajat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) serta sekolah lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di mulai sejak Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Mulai tahun 2011 dana bantuan operasional sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 menurut peraturan mendiknas nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan (SNP), bantuan operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Depdiknas, 2009:76)

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “ setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Depdiknas, 2006:57)

Pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban yang diterima.

Untuk melancarkan program pemberian dana bantuan operasional sekolah ini, perlu adanya manajemen BOS atau pengelolaan BOS yang transparan sehingga pengelolaannya berjalan lancar dan terkendali. Menurut Anwar, Idochi. (2000:82) bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS dilaksanakan agar: 1) sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS akuntabel dan kredibel, 2) penerima dana BOS dapat diterima sekolah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat, 3) pengelolaan dana BOS dapat dipergunakan dengan sesuai petunjuk pelaksanaan, 4) program dana BOS dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu telah tercapai.

Secara konsep program bantuan operasional sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan wajib belajar yang memadai dan bermutu.

Sekarang ini yang menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan yaitu adanya program bantuan operasional sekolah (BOS) yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Permendikbud No 8 tentang Juknis pengelolaan dana BOS 2017. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Program wajib belajar 9 tahun tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar dalam pendidikan tingkat dasar. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun menjadikan lulusan semakin meningkat, sehingga pemerintah menambah daya tampung layanan pendidikan menengah (SMA) untuk menampung para siswa memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun kondisi yang ada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Program Wajib 9 Tahun yang digulirkan sejak Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan telah mencapai target. Menurut data BPS, pada tahun 2003, APK SD/ sederajat sebesar 105,82%, meningkat hingga mencapai 107,71% pada tahun 2013. Untuk APK SMP/ sederajat sebesar 81,09% pada tahun 2003 dan sepuluh tahun kemudian sebesar 85,96%. Setelah pencapaian target tersebut, pemerintah melakukan perluasan program dengan nama Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan target APK untuk pendidikan menengah atau tingkat SMA/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 97%. Sebagai gambaran pada tahun 2012/2013 APK pendidikan menengah (SMA/ sederajat) masih tertinggal di angka 78,7%.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses seluas luasnya dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat termasuk lulusan SMP/ sederajat agar dapat melanjutkan ke sekolah pendidikan menengah. Salah satu perhatian pemerintah adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah (SMA/ sederajat). Untuk itu, pemerintah melaksanakan program BOS Sekolah Menengah (BOS SM).

Pentingnya Pengelolaan Dana BOS yaitu, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program

BOS dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan Dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung Pengelolaan Dana BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak Pengelola Dana BOS. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS adalah tim manajemen BOS pusat, tim manajemen BOS provinsi, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS. Menurut ketentuan, dana bantuan operasional sekolah BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai dengan program dan berdasarkan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah.

SMA Negeri 3 Bantaeng dengan Jumlah siswa 667 Orang, Melalui Observasi yang dilakukan peneliti, bahwa program dana BOS Di SMA Negeri 3 Bantaeng belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya ; 1) Terdapat Program sekolah yang tidak tertuang dalam Juknis Bos (2) keterlambatan pencairan/penyaluran dana BOS untuk menutupi sekolah harus berhutang atau meminjam uang baik dari koperasi sekolah atau sumber lainnya untuk keperluan sekolah sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pengadministrasian, penyusunan laporan dan potensi kekeliruan penggunaan dana BOS (3) Peran Komite Sekolah belum maksimal dalam Perencanaan Program BOS

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat pencapaian efektifitas Program BOS pada SMA Negeri 3 Bantaeng, sekiranya perlu dilakukan kajian melalui perencanaan, pemanfaatan dan Pengawasan Program Dana BOS, dari sinilah maka penelitian mengangkat judul “Pengelolaan Program Bantuan Operasional (BOS) Sekolah di SMA Negeri 3 Bantaeng”

Sebagai batasan dari permasalahan diatas maka penulis menghususkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng?
2. Bagaimana pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng ?
3. Bagaimana pengawasanProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS)di SMANegeri 3 Bantaeng?
4. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ;

1. Untuk Mengetahui perencanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng.
3. Untuk mengetahui pengawasan program Bantuan OperasionalSekolah (BOS) di SMANegeri 3 Bantaeng.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengenai pengelolaan program bantuan operasional sekolah di sma negeri 3 bantaeng. Dengan tujuan untuk menguraikan secara deskriptif mengenai pengelolaan program bantuan operasional sekolah di sma negeri 3 bantaeng

Fokus penelitian ini yaitu:Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 3 Bantaeng, meliputi: (1) Perencanaan (2) Pemanfaatan (3) Pengawasan (4) Faktor pendukung dan penghambat.

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Program BOS adalah mengakomodir semua sumber dana yang perlu digali dan tersedia bagi pencapaian tujuan yang diinginkan secara sistematis dan

tidak mengakibatkan hal negatif, yang meliputi melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, menghitung rasional anggaran setiap program kerja, mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis.

2. Pemanfaatan Program BOS adalah kegiatan pemanfaatan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian rutin dan program pembangunan. Indikator pemanfaatan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng meliputi: a) Pengembangan Perpustakaan, b) Penerimaan Peserta Didik Baru, c) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, e) Pengelolaan Sekolah, f) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, g) Langganan Daya dan Jasa, h) Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, i) Pembayaran Honor, j) Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.
3. Pengawasan Program BOS adalah pengawasan dengan pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran agar dapat diketahui atasan dan pihak lain yang berkaitan dengan keuangan sekolah.
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng.

Sumber data dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut narasumber ditetapkan secara purposif dengan kriteria bahwa subjek atau narasumber memahami tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah di SMA Negeri 3 Bantaeng. Hal ini kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa dengan demikian jumlah informan keseluruhan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dianggap kaya akan informasi tentang fenomena yang akan diteliti.

Dalam Proses pengumpulan data, interaksi antara peneliti dengan informan diharapkan akan memperoleh informasi yang mampu mengungkapkan permasalahan dilapangan secara umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan telaah dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan pengelolaan program

bantuan operasional sekolah di sma negeri 3 bantaeng. Teknik pengabsahan data (uji kredibilitas data) dilakukan dengan triangulasi dan membercheck

Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Untuk mengetahui tentang perencanaan program BOS di sma negeri 3 bantaeng maka dilakukan proses wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya.

a. Melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan

“Dalam merencanakan dana BOS panitia yang terlibat di dalamnya melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah melalui penyusunan RKAS yang kemudian dituangkan dalam RKA memuat penerimaan dan perencanaan dana BOS dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya”

Dari hasil wawancara bahwa panitia atau tim dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng dalam perencanaan dana BOS telah melakukan inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui penyusunan RKAS yang kemudian dituangkan dalam RKA memuat penerimaan dan perencanaan dana BOS dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya

b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas

“Sudah pasti, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dana BOS itu tidak cukup membiayai seluruh kegiatan sekolah, sehingga program mana yang menjadi skala prioritas untuk dibiayai setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perencanaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng disusun berdasarkan skala prioritas, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dana BOS itu belum cukup membiayai seluruh kegiatan sekolah sehingga perlu diterapkan skala proiritas untuk menentukan program mana yang terlebih dahulu dibiayai dalam artian program kegiatan yang penting dan mendesak untuk direalisasikan

c. Menentukan program kerja dan rincian program

“program kerja didasarkan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pihak yang ikut menyusun rencana anggaran adalah Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan, Komite Sekolah. Sekolah memiliki data siswa keluarga miskin untuk mempertimbangkan pembebasan dana operasional sekolah.

Dari hasil wawancara dengan SF, bahwa program kerja didasarkan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pihak yang ikut menyusun anggaran rencana adalah Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan, Komite Sekolah. Sekolah memiliki data siswa keluarga miskin untuk mempertimbangkan pembebasan dana operasional sekolah

d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program

“Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bahwa program kerja yang memanfaatkan dana BOS ditetapkan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan perincian program kerja dengan mengacu pada juknis yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SF, bahwa perencanaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng mengenai menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program kerja ditetapkan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan perincian program kerja dengan mengacu pada juknis yang ada.

e. Menghitung rasional anggaran setiap program kerja

Dalam juknis dana BOS sudah ditentukan posnya maksimal sekian persen, misalnya untuk membayar honor guru maksimal 15% (lima belas persen), kemudian pembelian buku 20% (dua puluh persen) jadi sisanya itu kita kondisikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Berdasarkan hasil wawancara dengan SF, bahwa sekolah telah melakukan perhitungan secara rasional anggaran setiap program kerja dan membagi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku misalnya untuk membayar honor guru maksimal 15% (lima belas persen), kemudian pembelian buku 20% (dua puluh persen) jadi sisanya itu kita kondisikan dengan kebutuhan sekolah

f. Mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis BOS

“Alokasi dana BOS setiap program kegiatan sudah diatur dalam juknis BOS, sehingga setiap program memiliki masing-masing batasan untuk pengalokasiannya”.

bahwa sekolah telah mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis BOS, sehingga setiap program memiliki batasan masing-masing dalam pengalokasiannya.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan Program BOS adalah kegiatan pemanfaatan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian rutin dan program pembangunan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Sekolah sebagai informan utama, selanjutnya bendahara BOS, Komite Sekolah, Guru, dan orang tua siswa menjadi informan pelengkap yang mendukung ke akuratan data pada penelitian ini.

Penelitian mengenai pemanfaatan dana BOS mencakup Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengembangan Perpustakaan

Salah satu indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah pengembangan perpustakaan. Untuk melihat hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng yang menyatakan bahwa:

Ya, pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan dilaksanakan melalui pengadaan buku teks satu kali dalam satu tahun ajaran pada awal tahun ajaran baru. Untuk pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan yang harus diperhatikan adalah dengan memprioritaskan pemilihan buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa Departemen yang menangani urusan agama atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau yang ditentukan melalui rapat sekolah

bahwa Untuk pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan yang harus diperhatikan adalah dengan memprioritaskan pemilihan buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa Departemen yang menangani urusan agama atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau

b. Penerimaan Peserta Didik Baru

“Pemanfaatan dana BOS melalui penerimaan peserta didik baru antara lain biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru termasuk juga untuk alat tulis kantor (ATK), konsumsi panitia.

Bahwa Pemanfaatan dana BOS melalui penerimaan peserta didik baru antara lain biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru termasuk juga untuk alat tulis kantor (ATK), konsumsi panitia

c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

“Kegiatan pembelajaran yang dibiayai adalah kegiatan pembelajaran kontekstual (SMA), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), pendidikan lingkungan hidup, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah.

Bahwa kegiatan pembelajaran yang dibiayai adalah kegiatan pembelajaran kontekstual (SMA), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), pendidikan lingkungan hidup, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah

d. Pembiayaan ujian semester dan ujian nasional

“Pemanfaatan dana BOS di sekolah kami juga diperuntukkan bagi pembiayaan evaluasi pembelajaran melalui kegiatan ujian semester dan ujian nasional yang dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan

akhir semester/ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, penggandaan soal ujian, konsumsi bagi pengawas ujian.

Bahwa pemanfaatan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng juga diperuntukkan bagi pembiayaan evaluasi pembelajaran melalui kegiatan ujian semester dan ujian nasional yang dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah

e. Pembelian bahan habis pakai

“Pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengelolaan sekolah melalui pembelian bahan habis pakai. Bahan-bahan habis pakai yang dibeli adalah bahan habis pakai pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris.

Pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengelolaan sekolah melalui pembelian bahan habis pakai. Bahan-bahan habis pakai yang dibeli adalah bahan habis pakai pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris

f. Pengembangan Profesi Guru

“Pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan profesi guru seperti membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah.

bahwa pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan profesi guru seperti membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah

g. Langganan Daya dan Jasa

“Pemanfaatan dana BOS di sekolah kami juga dialokasikan untuk biaya langganan daya dan jasa seperti yang dibayar adalah langganan listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar.

Bahwa pemanfaatan dana BOS di sekolah kami juga dialokasikan untuk biaya langganan daya dan jasa seperti yang dibayar adalah langganan listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar

h. Pemeliharaan dan Perawatan Sekolah

“Perawatan sekolah yang dibiayai oleh dana BOS adalah biaya perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeleur, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SF, bahwa perawatan sekolah yang dibiayai oleh dana BOS adalah biaya perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeleur, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas lainnya.

i. Pembayaran Honorarium guru tidak tetap

“Dalam membuat perencanaan anggaran dana BOS untuk membayar tenaga kerja honorer tetap dilakukan didalam rapat penyusunan RKAS dengan mendata jumlah tenaga honorer. Adapun ketentuan Guru Tidak Tetap dibayarkan honornya Rp. 10.000 perjam.

Dari hasil wawancara dengan SF, bahwa Dalam membuat perencanaan anggaran dana BOS untuk membayar tenaga kerja honorer tetap dilakukan didalam rapat penyusunan RKAS dengan mendata jumlah tenaga honorer. Adapun ketentuan Guru Tidak tetap

j. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.

“Bila seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, komputer, peralatan UKS, pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

Dari hasil wawancara dengan SF, bahwa bila seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, komputer, peralatan UKS, pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah

3. Pengawasan

Pengawasan Program BOS adalah pengawasan dengan pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran agar dapat diketahui atasan dan pihak lain yang

berkaitan dengan keuangan sekolah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Sekolah sebagai informan utama, selanjutnya bendahara BOS, Komite Sekolah, Guru, menjadi informan pelengkap yang mendukung ke akuratan data pada penelitian ini.

Penelitian mengenai pengawasan dana BOS mencakup Siapa yang mengawasi dana BOS, Waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS, Pengawasan dari Dinas pendidikan Cabang atau Provinsi, Pengawasan dari masyarakat, Hasil pengawasan terkait pemanfaatan dana BOS, Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Siapa yang mengawasi dana BOS

“Yang mengawasi dana BOS adalah inspektorat provinsi yang rutin datang ke sekolah setiap semester”.

Bahwa pengawas dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng adalah pihak inspektorat provinsi yang rutin datang setiap semester

b. Waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS

“Untuk pengawas dari dinas pendidikan provinsi dilakukan oleh dinas cabang pendidikan wilayah V 1 kali dalam setiap semester dan inspektorat provinsi setiap semester datang namun tidak menentu waktunya dan hadir minimal dua kali dalam satu semester”

Bahwa pengawas inspektorat provinsi setiap semester datang namun tidak menentu waktunya dan hadir minimal dua kali dalam satu semester.

c. Pengawasan dari masyarakat

“Pengawasan dari masyarakat, pengawasan LSM itu kami anggap sebagai representasi dari masyarakat, sehingga dengan adanya LSM sebagai pengawas, sekolah kami ini menjadi lebih terkontrol dalam pemanfaatan dana BOS”

bahwa di SMA Negeri 3 Bantaeng ada pengawasan dari masyarakat melalui LSM sebagai representasi dari masyarakat sehingga sekolah menjadi lebih terkontrol dalam pemanfaatan dana BOS.

d. Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS

“Selama saya memimpin di sekolah ini belum ada pengaduan dari masyarakat terkait program BOS”.

Bahwa di SMA Negeri 3 Bantaeng sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat terkait program BOS.

4. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

“Faktor pendukung pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng antara lain: “Keberhasilan pelaksanaan dari program dana bantuan operasional sekolah yang kami kelola tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari pemerintah sampai dengan ke para rekan-rekan kerja saya adapun faktor pendukung itu seperti: kebijakan pemerintah tentang petunjuk pengelolaan dana BOS, adanya sosialisasi yang diberikan oleh dinas pendidikan tentang pengelolaan dana BOS, bentuk kerja sama yang baik dengan dinas pendidikan sehingga kami merasa terbantu dalam pengelolaan dana BOS ini, dukungan dari teman-teman guru yang telah bersama-sama berjuang membangun sekolah ini, dan tentunya dukungan itu juga kami dapatkan dari pihak komite sekolah yaitu para orang tua siswa telah menyumbangkan ide-ide dan pikiran mereka untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan”.

Bahwa Faktor pendukung pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng antara lain: (Berdasarkan hasil wawancara diatas maka telah diperoleh informasi tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu; kebijakan pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yang dimuat dalam JUKNIS pengelolaan dana BOS, adanya dukungan dari dinas pendidikan seperti memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan operasional sekolah serta akan siap memberikan pendampingan, dukungan dari para guru yang telah secara bersama-sama bekerja untuk mewujudkan tujuan sekolah, dan dukungan dari komite sekolah oleh guru dan para orang tua siswa/ tokoh masyarakat yang telah menyumbangkan ide-ide dan pikiran mereka untuk memajukan lembaga pendidikan ini sehingga tujuan-tujuan yang dicita-citakan dapat terwujud.

b. Faktor Penghambat

“Yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah khususnya di sekolah ini yaitu, pencairan dana BOS terkadang mengalami keterlambatan sehingga akan mengganggu program yang telah direncanakan, selain daripada itu laporan tentang perincian dana yang telah digunakan harus tepat waktu untuk dilaporkan sehingga kami terkadang para pihak pengelola harus mencari dana untuk menutupi keterlambatan tersebut. Jadi menurut saya hal ini harus segera diberikan solusinya sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan program bantuan operasional sekolah.

Bahwa Faktor Penghambat pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng antara lain: faktor penghambat yang dihadapi ialah seringnya

terjadi keterlambatan dalam pencairan dana bantuan operasional sekolah tersebut, sehingga memberikan dampak terhadap banyaknya pelaksanaan program-program sekolah yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal, selain dari pada itu untuk menutupi keterlambatan tersebut maka sekolah akan mencari sumbangan dana untuk menutupi keterlambatan tersebut dikarekan sekolah ahrus tepat waktu dalam memberikan laporan tentang rincian penggunaan dana tersebut terhadap Dinas Pendidikan. Harapan dari para pengelola anggaran dana BOS di sekolah tersebut ialah agar solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dengan cepat diatasi. Menyangkut besaran anggaran yang diterima banyak sekolah merasa dana yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah yang mereka butuhkan sehingga ini sering menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pengelola

Pembahasan

Pengelolaan program Bantuan operasional sekolah akan diuraikan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, faktor pendukung, dan faktor penghambat efektivitas program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan Program BOS adalah mengakomodir semua sumber dana yang perlu digali dan tersedia bagi pencapaian tujuan yang diinginkan secara sistematis dan tidak mengakibatkan hal negatif, yang meliputi melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, menghitung rasional anggaran setiap program kerja, mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis. dapat dijabarkan sebagai berikut:

Salah satu indikator mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah melakukan inventarisasi rencana yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa panitia atau tim dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng dalam perencanaan dana BOS telah melakukan inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui penyusunan RKAS yang kemudian dituangkan dalam RKA yang memuat penerimaan dan perencanaan dana

BOS dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan.

Indikator berikutnya mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah menyusun rencana berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng disusun berdasarkan skala prioritas, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dana BOS itu belum cukup membiayai seluruh kegiatan sekolah sehingga perlu diterapkan skala prioritas untuk menentukan program mana yang terlebih dahulu dibiayai dalam artian program kegiatan yang penting dan mendesak untuk direalisasikan.

Indikator selanjutnya mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah menentukan program kerja dan rincian program. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tim dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng telah menyusun program kerja berdasarkan juknis yang ada serta memilah program yang dimasukkan dalam program kerja dan disusun secara terperinci dengan menggunakan bagan *flowchart*.

Indikator lainnya mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng mengenai menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program kerja ditetapkan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan perincian program kerja dengan mengacu pada juknis yang ada seperti pengadaan buku ajar, penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, biaya evaluasi pembelajaran, pengadaan media pembelajaran, pembayaran gaji guru honorer, biaya jasa dan listrik serta biaya pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

Indikator lain mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah menghitung rasional anggaran setiap program kerja. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah melakukan perhitungan secara rasional anggaran setiap program kerja dan membagi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku misalnya untuk membayar honor guru maksimal 15% (lima belas persen), kemudian pembelian buku 20% (dua puluh persen) jadi sisanya itu kita kondisikan dengan kebutuhan sekolah.

Indikator terakhir mengenai perencanaan dana BOS di sekolah adalah mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis BOS. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng mengenai pengalokasian dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis telah mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis BOS, sehingga setiap program memiliki batasan masing-masing dalam pengalokasiannya misalnya untuk membayar honor guru maksimal 15% (lima belas persen), kemudian pembelian buku 20% (dua puluh persen) jadi sisanya itu kita kondisikan dengan kebutuhan sekolah.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan Program BOS adalah kegiatan pemanfaatan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian rutin dan program pembangunan. Penelitian mengenai pemanfaatan dana BOS mencakup Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Salah satu indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah pengembangan perpustakaan. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan dilaksanakan melalui pengadaan buku teks satu kali dalam satu tahun ajaran pada awal tahun ajaran baru. Untuk pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan yang harus diperhatikan adalah dengan memprioritaskan pemilihan buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa Departemen yang menangani urusan agama atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau.

Indikator berikutnya mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembiayaan kegiatan untuk penerimaan siswa baru dana BOS digunakan untuk biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. termasuk juga untuk alat tulis kantor (ATK), konsumsi panitia dan uang lembur, standar pembiayaan mangacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Indikator selanjutnya mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dibiayai adalah kegiatan pembelajaran kontekstual (SMA), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), pendidikan lingkungan hidup, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah, termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya, biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

Indikator berikutnya mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah biaya kegiatan ujian semester dan ujian nasional. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan kegiatan ulangan siswa yang dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Termasuk untuk fotocopy/pengadaan soal, biaya koreksi ujian, pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua, biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru, biaya transport pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Selain itu indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah biaya pembelian bahan habis pakai. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian,

maka dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan habis pakai yang dibeli adalah bahan habis pakai pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor dan alat-alat kebersihan.

Selanjutnya indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah pengembangan profesi guru. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan profesi guru seperti membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. Khususnya untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut, fotocopy, biaya pendaftaran dan akomodasi seminar.

Kemudian indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah biaya langganan daya dan jasa. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng juga dialokasikan untuk biaya langganan daya dan jasa yang dibayar seperti langganan listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar, pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru.

Selanjutnya indikator mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah biaya pemeliharaan dan perawatan sekolah. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 3 Bantaeng memanfaatkan dana BOS untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, bentuk-bentuk kegiatan perawatan sekolah yang akan dibiayai oleh dana BOS adalah: biaya perbaikan dan perawatan fasilitas sekolah ringan seperti pengecatan, perbaikan jendela, atap bocor, memperbaiki mushala dan berbagai perawatan ringan sekolah lainnya.

Indikator lain mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah pembayaran honorarium guru tidak tetap. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran dana BOS untuk

membayar tenaga kerja honorer tetap dilakukan didalam rapat penyusunan RKAS dengan mendata jumlah tenaga Guru Tidak Tetap. Indikator berikutnya mengenai pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah pembelian alat multimedia pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, komputer, peralatan UKS, pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap jalannya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan BOS SMA, sedangkan supervisi bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat BOS SMA bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencairkan solusi pemecahan masalah. Hasil pemantauan dan supervisi dijadikan sebagai perencanaan program BOS SMA di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMA serta Dinas Pendidikan Provinsi.

Pengawasan Program BOS adalah pengawasan dengan pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran agar dapat diketahui atasan dan pihak lain yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Penelitian mengenai pengawasan dana BOS mencakup Siapa yang mengawasi dana BOS, Waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS, Pengawasan dari Dinas pendidikan Cabang atau Provinsi, Pengawasan dari masyarakat, Hasil pengawasan terkait pemanfaatan dana BOS, Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS dapat dijabarkan sebagai berikut:

Salah satu indikator mengenai pengawasan dana BOS di sekolah adalah siapa yang mengawasi dana BOS. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengawas dana BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng dilaksanakan oleh pihak internal dalam hal ini dilakukan oleh komite sekolah dan pihak eksternal dalam hal ini diwakili oleh pihak inspektorat Provinsi.

Selanjutnya indikator mengenai pengawasan dana BOS di sekolah adalah waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengawas inspektorat provinsi setiap semester datang namun tidak menentu waktunya dan hadir minimal dua kali dalam satu semester.

Selain itu indikator mengenai pengawasan dana BOS di sekolah adalah pengawas dari masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 3 Bantaeng ada pengawasan dari masyarakat melalui LSM sebagai representasi dari masyarakat sehingga sekolah menjadi lebih terkontrol dalam pemanfaatan dana BOS.

Indikator terakhir mengenai pengawasan dana BOS di sekolah adalah pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 3 Bantaeng sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat terkait program BOS.

4. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Program Bantuan Operasional Sekolah

- a. Faktor pendukung pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng antara lain:
 1. Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan
 2. Terjalinnya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan)
 3. Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan,
 4. Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga
- b. Faktor Penghambat pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Bantaeng antara lain :
 1. Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan,
 2. Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah

3. Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruanga
4. Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pengelolaan program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Perencanaan Program BOS di SMA Negeri 3 Banataeng meliputi; melakukan inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, menghitung rasional anggaran setiap program kerja, mengalokasikan dana BOS setiap program kegiatan berdasarkan juknis.
2. Pemanfaatan Program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng mencakup; pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, pembelian alat multimedia pembelajaran.
3. Pengawasan Program BOS di SMA Negeri 3 Bantaeng meliputi; Siapa yang mengawasi dana BOS, Waktu pelaksanaan pengawasan BOS dan berapa kali pengawasan BOS, Pengawasan dari Dinas pendidikan Cabang atau Provinsi, Pengawasan dari masyarakat, Hasil pengawasan terkait pemanfaatan dana BOS, Pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan program BOS.
4. Faktor pendukung pengelolaan program BOS antara lain; . Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, Terjalinnya bentuk kerja sama yang baikdari pihak pengelolah dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan), Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga

Sedangkan faktor penghambat meliputi; waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu manajemen pendidikan mengenai pengelolaan anggaran dana BOS di sekolah.
2. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan acuan atau referensi untuk mengkaji lebih dalam dengan cara menindaklanjuti perkembangan kedepannya mengenai pengelolaan anggaran dana BOS di sekolah.
3. Kepala sekolah, sebagai bahan informasi untuk meningkatkan sistem manajemen di sekolah sekaitan dengan pengelolaan anggaran dana BOS di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Renneka Cipta
- Adawiah, Rabiatul, & . Karim. 2011. *Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Bagi Siswa Miskin*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat
- Atas. 2014. Direktorat Pembinaan SMA: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bambang, Tutoko. 2006. *Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Sekolah (RAPBS)*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Danumihardja, Mintarsih. 2004. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: UHMKA.
- Dharmasraya, Putra. 2009. *Manajemen Keuangan Sekolah*. jakarta
- Depdiknas & Depag. 2006. *Buku Panduan Oprasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- (2007). *Buku panduan BOS Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- (2008). *Buku panduan BOS Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.
- (2009). *Buku panduan BOS Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- 2010. *Buku Panduan Oprasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- Elmizola, Fitriani. 2015. Efektivitas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SMPN 1 Tanjungsamak Kec. Rangsang kabupaten kepulauan meranti *JOM FISIP Vol. 2 No. 2 - Oktober 2015*
- Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan. & kk. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Husnaini Usman. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pascasarjana UNY
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga

- Irawan, Ade, Dkk. 2004. *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia corruption watch.
- Islamy, M.Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jaya, Indra. 2014. Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Ketidak Berhasilan Pemanfaatan Dana Bos Di Sumatera Utara *Jurnal Tarbiyah, Vol. 21, No.1 Januari-Juni 2014 ISSN: 0854-2627*
- Kast, F.E dan Rosenzweig, J.E. (2007). *Organisasi dan Manajemen 2*. (diterjemahkan A.Hasyim Ali). Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. M. 2008. *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mentri Dalam Negeri. 2017. *Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Muhaimin, dkk (2010). *Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah /Madrasah*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia Group. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang . 2002. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurdin,usman. 2002. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Mandiri Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun. 2008. *Tentang Pendanaan Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Dalam Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
- Permendikbud No 08. 2017. *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksan Program Dana BOS 2017*. Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Menteri pendidikan.
- PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Terry, G. R dan Rue, L.W. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sagala, Saeful. 2007. *Manajemen stratejik dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Supriadi, Didi. 2006. *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suyanto. 2009. *Buku panduan oprasional sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermut*. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional.
- Soenarko.2000. *Public Policy. Pengertian-Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press,

